



Sejarah Perkembangan Kurikulum Di Indonesia

Desi Sandra Putri¹, Marzelni², Yefrineng Delastri³, Desi Anggraini⁴, Demina⁵
Darmansyah⁶

Manajemen Pendidikan Islam UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar^{1,2,3,4,5},
Universitas Negeri Padang⁶

Abstrak

Received: 2 Oktober 2024

Revised: 13 Oktober 2024

Accepted: 29 Oktober 2024

The aim of writing this article is to explain the history of curriculum development in Indonesia. This scientific journal presents material related to curriculum development in Indonesia from the colonial era to independence, then analyzes it and presents it systematically in this paper. The results of this article present the history of curriculum development in Indonesia.

Keywords: History, curriculum

(*) Corresponding Author:

desitwin1980@gmail.com, marzelni010919@gmail.com,
yefrineng.delastri@gmail.com, desi8549@gmail.com,
demina@uinmybatusangkar.ac.id, darmansyah@fip.unp.ac

How to Cite: Putri, D., Marzelni, M., Delastri, Y., Anggraini, D., Demina, D., & Darmansyah, D. (2025). Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1.D), 111-122. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9693>

PENDAHULUAN

Kurikulum sebagai landasan utama dalam proses pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan suatu bangsa. Di Indonesia, perkembangan kurikulum tidak lepas dari berbagai konteks sejarah, politik, sosial, dan budaya yang mempengaruhi perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan.

Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang bangsa ini dalam mengejar cita-cita pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh rakyatnya. Dari masa kolonialisme hingga era kemerdekaan, serta berbagai dinamika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, telah membentuk corak-curikulum yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Pada makalah ini, akan dipaparkan secara komprehensif tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Mulai dari pengaruh kolonialisme Belanda dalam pembentukan kurikulum pendidikan di masa lalu, hingga transformasi yang terjadi seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Penelusuran ini tidak hanya mengulas perkembangan secara kronologis, tetapi juga menganalisis faktor-faktor sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi evolusi kurikulum di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan pendidikan yang terus meningkat pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia. Secara formal, kurikulum sejak zaman Belanda sudah diterapkan di sekolah, artinya kurikulum juga sudah ada. (Wahyuni, 2015b)

Pada masa pemerintahan Belanda dan Jepang, pendidikan dan sekolah memiliki kurikulum yang khas, yang tentu saja mencerminkan tujuan kolonialisme dari kedua kekuatan tersebut. Kurikulum pada zaman tersebut dirancang untuk mendukung agenda kolonial masing-masing, baik itu untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, seperti yang dilakukan oleh Belanda dengan memanfaatkan tenaga kerja pribumi, maupun untuk mencapai

tujuan perluasan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh Jepang, yang dikenal dengan Konsep Asia Timur Raya dalam memperkuat dominasinya dalam wilayah Asia Timur.

Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pendidikan di negeri ini terus mengalami pertumbuhan yang signifikan, termasuk perhatian yang diberikan oleh Pemerintah terhadap perkembangan kurikulum. Sebagai hasilnya, perkembangan kurikulum di Indonesia bisa dibagi menjadi dua periode, yaitu masa sebelum kemerdekaan atau masa penjajahan, dan masa sesudah kemerdekaan.

Seiring dengan perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami serangkaian perubahan, yang terjadi pada tahun-tahun seperti 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, dan yang terbaru pada tahun 2022. Perubahan tersebut merupakan hasil dari evolusi sistem politik, sosial-budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat Indonesia. Hal ini karena kurikulum sebagai suatu rencana pendidikan harus terus berkembang secara dinamis agar dapat memenuhi tuntutan dan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun semua kurikulum nasional didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, namun terdapat variasi dalam penekanan tujuan pendidikan serta pendekatan yang digunakan untuk mewujudkannya.

Dengan memahami sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, diharapkan kita dapat mengidentifikasi pola-pola perubahan, kesinambungan, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan bangsa. Selain itu, pemahaman mendalam tentang sejarah kurikulum juga dapat memberikan wawasan yang lebih baik dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan relevan dengan tuntutan zaman.

Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia mencerminkan dinamika panjang dalam pembentukan identitas pendidikan nasional. Berbagai periode sejarah, mulai dari masa kolonialisme, kemerdekaan, hingga era reformasi, telah memberikan landasan yang berbeda-beda dalam pembentukan kurikulum pendidikan. Perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terjadi di Indonesia juga turut memengaruhi perubahan dalam kurikulum pendidikan.

Perjalanan panjang ini memunculkan pola-pola perubahan yang memengaruhi fokus, metode, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam pendidikan nasional. Sebagai negara yang heterogen dengan keberagaman budaya, agama, dan etnis, tantangan dalam merumuskan kurikulum yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat menjadi krusial.

Melalui pemahaman mendalam terhadap sejarah perkembangan kurikulum, diharapkan dapat memberikan landasan yang kokoh dalam merancang kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan yang beragam. Sejarah ini menjadi cermin bagi kita untuk mengenali keberhasilan, kegagalan, serta pelajaran berharga dalam perjalanan pendidikan nasional Indonesia

METODE

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kurikulum

Kurikulum berasal dari bahasa Yunani berasal dari kata *curir* yang berarti pelari, dan *curere* yang berarti tempat berpacu atau tempat berlomba. Dari dua kata ini kurikulum diartikan sebagai jarak perlombaan yang harus ditempuh oleh pelari dalam suatu arena perlombaan. (Wahyuni, 2015a)

Dalam dunia pendidikan kurikulum bisa diartikan secara sempit maupun secara luas. Secara sempit kurikulum diartikan hanya sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa di sekolah atau di perguruan tinggi. Secara lebih luas kurikulum diartikan tidak terbatas pada mata pelajaran saja, tetapi lebih luas daripada itu, kurikulum diartikan merupakan aktivitas apa saja yang dilakukan di sekolah dalam rangka mempengaruhi anak dalam belajar untuk mencapai suatu tujuan, termasuk didalamnya kegiatan belajar mengajar, mengatur strategi dalam proses belajar, cara mengevaluasi program pengembangan pengajaran.

Oemar Hamalik melihat kurikulum dari beberapa tafsiran sebagai berikut: 1) Kurikulum memuat isi dan materi pelajaran, 2) Kurikulum sebagai rencana pembelajaran, dan 3) Kurikulum sebagai pengalaman belajar. Kurikulum memuat isi dan materi pelajaran yang ada dalam kurikulum terdapat sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh serta dipelajari oleh siswa selama mengikuti kegiatan pendidikan atau kegiatan pembelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Dalam pandangan ini mata pelajaran merupakan pengalaman orang tua atau orang-orang pandai masa lalu yang telah tersusun secara rasional, logis dan sistematis.

Kurikulum sebagai rencana pembelajaran merupakan suatu program dan rencana pendidikan yang disesuaikan untuk membelajarkan siswa. Dengan program dan rencana yang telah dibuat siswa melakukan aktivitas belajar untuk mengembangkan dan merubah tingkah laku sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rencana pembelajaran yang dibuat guru harus merancang keterlibatan siswa secara aktif untuk melakukan aktivitas belajar.

Kurikulum sebagai pengalaman belajar. Dalam hal ini kurikulum dirancang untuk memberikan pengalaman belajar serta mengembangkan kecakapan hidup siswa. Kurikulum sebagai pengalaman belajar mengisyaratkan bahwa kegiatan belajar tidak hanya berlangsung dalam ruangan kelas, akan tetapi juga bisa berlangsung di luar ruangan kelas. Dengan demikian semua kegiatan belajar yang dilakukan baik di dalam ruangan kelas maupun di luar kelas disebut kurikulum.

Dari beberapa pengertian diatas maka kurikulum dapat diartikan secara luas merupakan sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh siswa, serta rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru dan sejumlah pembelajaran belajar yang harus dilakukan oleh siswa. (Wahyuni, 2015)

1. Mengapa Kurikulum Harus dirubah?

Kurikulum tidak terlepas dari perubahan, sehingga selalu dikatakan setiap perubahan kurikulum selalu identik dengan pergantian Menteri. Namun, dalam hal kenyataannya, jika kurikulum tidak mengalami perubahan, maka kurikulum tidak akan mampu untuk menjawab tantangan zaman. Lebih-lebih lagi, setiap zaman yang dilewati manusia, menampilkan corak yang beragam dari tingkah laku anak didik. (Aslan & Wahyudin, n.d.)

Kurikulum dianggap sebagai pondasi utama dalam menetapkan tujuan pendidikan, materi pembelajaran, metode pengajaran, dan proses evaluasi dalam

sistem pendidikan suatu negara. Seiring berjalannya waktu, penting bagi kurikulum untuk mengalami transformasi agar tetap relevan dengan perubahan zaman dan kebutuhan peserta didik.

Sebelum kita membahas tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia maka penting kita mengetahui mengapa kurikulum perlu dirubah yaitu karena Perubahan dan pembaruan kurikulum adalah suatu keharusan dalam dunia pendidikan.(Eka, 2023). Beberapa alasan mengapa kurikulum harus diubah dan diperbaharui adalah sebagai berikut (Eka, 2023)

a. Menyesuaikan dengan tuntutan zaman

Perubahan kurikulum diperlukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan zaman yang terus berkembang. Kurikulum harus mampu mengintegrasikan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai budaya yang relevan dengan kehidupan masa kini.

b. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

Pembaruan kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menghadirkan metode pengajaran yang lebih efektif, inovatif, dan interaktif. Kurikulum yang diperbaharui juga dapat mendorong pembelajaran berbasis keterampilan (*skill-based learning*) untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan.

c. Mengakomodasi kebutuhan pendidik

Setiap peserta didik memiliki keunikan dan kebutuhan yang berbeda. Kurikulum yang disesuaikan dengan keberagaman siswa dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang sesuai potensinya.

d. Mengoptimalkan pemanfaatan Sumber daya

Pembaruan kurikulum juga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pendidikan, seperti buku teks, perangkat teknologi, dan fasilitas yang ada. Dengan kurikulum yang relevan, sumber daya dapat digunakan secara lebih efisien.

e. Menyongsong Perubahan Global

Perubahan kurikulum juga harus mempertimbangkan perkembangan global, termasuk perubahan dalam ekonomi, politik, dan sosial. Kurikulum yang disesuaikan dapat membantu menghadapi tantangan global dan mempersiapkan generasi mendatang untuk berperan aktif dalam lingkungan yang lebih luas.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perubahan Kurikulum

Setelah kita memahami beberapa alasan yang menyebabkan perlunya dilakukan perubahan kurikulum, berikut adalah penjelasan mengenai factor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Sebenarnya Perubahan kurikulum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum antara lain :

a. Perkembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung mempengaruhi perubahan kurikulum. Perkembangan ilmu pengetahuan baru mengharuskan penyempurnaan dan pembaruan materi pelajaran agar tetap relevan dengan perkembangan zaman

b. Kebutuhan Dunia Kerja

Dunia kerja juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Kurikulum harus dapat mempersiapkan lulusan untuk memiliki keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

c. Tuntutan Global dan Standar Internasional

Dunia kerja juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Kurikulum harus dapat mempersiapkan lulusan untuk memiliki keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja

d. Konsultasi dan Partisipasi StakeHolder

Partisipasi *stakeholder*, seperti guru, orangtua, siswa, ahli pendidikan, dan pemerintah, menjadi penting dalam merumuskan perubahan kurikulum. Konsultasi dengan berbagai pihak membantu menciptakan kurikulum yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

e. Evaluasi dan Penelitian Pendidikan

Evaluasi dan penelitian pendidikan berperan penting dalam menentukan efektivitas kurikulum yang ada. Temuan dari evaluasi dan penelitian membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kurikulum yang dapat dijadikan acuan untuk perubahan

3. Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia

Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai fase yang mencerminkan perubahan sosial dan politik negara. Beberapa fase penting dalam sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia adalah :

1. Periode Sebelum Kemerdekaan

Menurut Abdullah dalam (Wahyuni, 2015) Sejarah perkembangan kurikulum pada masa periode penjajahan, yaitu sejak datangnya orang-orang Eropa yaitu pada masa kompeni Belanda dan masa pemerintahan Jepang sampai periode kemerdekaan.

Kurikulum pada masa kompeni mempunyai misi penyebaran agama dan untuk mempermudah pelaksanaan perdagangan di Indonesia. Pada abad 16 dan 17 berdirilah lembaga-lembaga pendidikan dalam upaya penyebaran agama Kristen di Indonesia, pendidikan tersebut untuk bangsa Belanda dan pribumi. Dengan adanya lembaga pendidikan tersebut pihak kompeni merasakan perlunya pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis.

Pada masa Jepang, perkembangan pendidikan mempunyai arti tersendiri bagi bangsa Indonesia yaitu terjadinya keruntuhan sistem pemerintahan kolonial Belanda. Tujuan utamanya pendidikan pada masa pendudukan Jepang adalah untuk memenangkan perang.² Pada masa ini munculah sekolah rakyat yang disebut Kokumin Gako selama 6 tahun lamanya, selanjutnya pelajaran berbau Belanda dihilangkan dan Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar.

2. Periode Setelah Kemerdekaan

a. Rentjana Pelajaran 1947 (Kurikulum 1947)

Kurikulum ini dibuat tepat setelah dua tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan. Penamaan kurikulum ini awalnya masih menggunakan istilah Belanda, yaitu Leerplan. (rencana pelajaran) (Zebua, 2020) ketimbang istilah curriculum dalam bahasa Inggris. Karena pada masa itu, Indonesia berada dalam pergolakan akibat agresi militer Belanda beserta sekutunya. Asas pendidikan yang ditetapkan adalah Pancasila.

Situasi perpolitikan dengan gejolak perang revolusi, maka Rencana Pelajaran 1947, baru diterapkan pada tahun 1950. Oleh karena itu Rencana Pelajaran 1947 sering juga disebut kurikulum 1950. Susunan Rencana Pelajaran 1947 sangat sederhana, hanya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, serta garis-garis besar pengajarannya.

Saat menciptakan kurikulum ini, pemerintah mencoba rancangan sistem pembelajaran untuk para pelajar di masa revolusi yang menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Sehingga belum berfokus pada pendidikan pikiran, melainkan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat.

Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Mata pelajaran untuk tingkat Sekolah Rakyat ada 16, khusus di Jawa, Sunda, dan Madura diberikan bahasa daerah. Daftar pelajarannya adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Berhitung, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi, Sejarah, Menggambar, Menulis, Seni Suara, Pekerjaan Tangan, Pekerjaan Keputrian, Gerak Badan, Kebersihan dan Kesehatan, Didikan Budi Pekerti, dan Pendidikan Agama. Pada awalnya pelajaran agama diberikan mulai kelas IV, namun sejak 1951 agama juga diajarkan sejak kelas 1.

Garis-garis besar pengajaran pada saat itu menekankan pada cara guru mengajar dan cara murid mempelajari. Misalnya, pelajaran bahasa mengajarkan bagaimana cara bercakap-cakap, membaca, dan menulis. Ilmu Alam mengajarkan bagaimana proses kejadian sehari-hari, bagaimana mempergunakan berbagai perkakas sederhana (pompa, timbangan, manfaat bes berani), dan menyelidiki berbagai peristiwa sehari-hari, misalnya mengapa lokomotif diisi air dan kayu, mengapa nelayan melaut pada malam hari, dan bagaimana menyambung kabel listrik.

b. Rentjana Pelajaran terurai (Kurikulum 1952)

Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. (Zebua, 2020) Pada tahun 1952 ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap pembahasan topik tiap mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat harus berkaitan. Dalam kurikulum ini, berlaku pula ketentuan satu orang tenaga pendidik hanya bisa mengajar satu mata pelajaran saja.

c. Rentjana Pendidikan 1964 Kurikulum (1964)

Setelah tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Konsep pembelajaran dalam Kurikulum 1964 berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Konsep-konsep pembelajaran ini lebih dikenal dengan sebutan Pancawardhana. yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral.

Penerapan Kurikulum 1964 di dalam proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Kurikulum 1964 bertujuan untuk menanamkan

pengetahuan akademik dari jenjang Sekolah Dasar (SD). Selain itu pemerintah menetapkan hari Sabtu sebagai hari bagi siswa untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai minat dengan bakatnya.

Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan (keterampilan), dan jasmani. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis.

d. Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. (Insani et al., 1947) Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen

Kurikulum ini memiliki ciri materi dari jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Pada Kurikulum 1968 ini pula, sistem penjurusan dimulai pada kelas 2 SMU atau kelas 11.

e. Kurikulum 1975

Kurikulum ini mulai digunakan setelah program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) tahap pertama di masa pemerintahan Orde Baru. Kurikulum ini menekankan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. “Yang melatarbelakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO (management by objective) yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Zaman ini dikenal istilah “satuan pelajaran”, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi: petunjuk umum, tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi.

Namun penerapan kurikulum ini ramai dikritik, karena guru menjadi lebih sibuk untuk menuliskan rincian tiap kegiatan pembelajaran. Beberapa mata pelajaran akhirnya mengalami perubahan nama seperti mata pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Mata pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi Matematika.

f. Kurikulum 1984 (Kurikulum CBSA)

Di tahun 1984 terjadi lagi perubahan kurikulum di Indonesia, karena kurikulum sebelumnya dianggap lambat dalam merespons kemajuan di kalangan masyarakat. Dalam kurikulum 1984, ditambahkan juga mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB).

Kurikulum 1984 mengusung process skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut “Kurikulum 1975 yang disempurnakan”. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL).

Kurikulum 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksional. Didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu

belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai siswa.

g. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999

Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam satu tahun menjadi tiga tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah.

Kedua kurikulum ini dibuat dari hasil kombinasi Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1984. Pada praktiknya, kurikulum ini banyak mendapatkan kritikan dari praktisi pendidikan hingga orangtua pelajar. Karena materi pembelajaran dianggap lebih berat dan padat. Kurikulum ini juga menambahkan mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Selain itu terjadi perubahan singkatan dan nama SMP (Sekolah Menengah Pertama) menjadi SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), serta SMA (Sekolah Menengah Atas) menjadi SMU (Sekolah Menengah Umum). Mata pelajaran PSPB dihapuskan pada penerapan kurikulum ini dan penjurusan SMA dibagi menjadi tiga program, yakni IPA, IPS, dan Bahasa.

h. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004

Setelah 10 tahun Kurikulum 1994 berjalan, kurikulum ini digantikan oleh KBK di tahun 2004. Kurikulum 2004 ini lebih dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Dengan berlakunya KBK, sekolah diberi kuasa untuk menyusun dan mengembangkan komponen kurikulum yang mulanya berbasis materi menjadi kompetensi, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah serta peserta didiknya.

Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Implikasinya adalah perlu dikembangkan suatu kurikulum berbasis kompetensi sebagai pedoman pembelajaran.

Kurikulum Berbasis Kompetensi berorientasi pada:

- 1) Hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna.
- 2) Keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan yang ingin dicapai menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal.

Kurikulum ini menekankan 3 unsur pokok kompetensi, yaitu pemilihan kompetensi, indikator-indikator evaluasi dalam penentuan keberhasilan pencapaian, serta pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Dalam Kurikulum 2004 ini, pemerintah mengubah kembali nama SLTP menjadi SMP dan SMU menjadi SMA Kembali.

i. Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) 2006

Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Awal 2006 ujicoba KBK dihentikan, muncullah KTSP. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan Kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan kerangka dasar (KD), standar kompetensi lulusan (SKL), standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi pengembangan perangkat pembelajaran, seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan (sekolah) dibawah koordinasi dan supervisi pemerintah Kabupaten/Kota.

Kurikulum ini mulai digunakan sejak berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang dijelaskan dengan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2003. Meskipun kurikulum ini hampir mirip dengan KBK 2004, pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian tenaga pengajar bisa mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah serta kebutuhan peserta didik di masing-masing daerah.

j. Kurikulum 2013 (K-13)

Kurikulum KTSP dianggap belum sempurna dan masih banyak kekurangan, apalagi saat ini adalah era digital yang apa-apa bisa dilakukan dengan teknologi maka KTSP harus segera dirubah menjadi kurikulum 2013.(Eka, 2023). Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan pemerintah menggantikan KTSP 2006. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Tujuan kurikulum 2013 adalah membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan abad ke-21. Ada 4 aspek penilaian dalam K-13 ini antara lain, aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku.

Inti dari Kurikulum 2013, adalah ada pada upaya penyederhanaan, dan tematik-integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Titik beratnya, bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun obyek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya.

Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik.

Pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian dari melanjutkan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah dirintis pada

tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu, sebagaimana amanat UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Paparan ini merupakan bagian dari uji publik Kurikulum 2013, yang diharapkan dapat menjaring pendapat dan masukan dari masyarakat.

k. Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari 2022 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran (*learning crisis*) yang cukup lama. Selain itu, kondisi ini diperparah akibat pandemi Covid-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kurikulum ini berfokus untuk mengasah minat dan bakat anak sedini mungkin. Sehingga peserta didik memiliki waktu untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Akibatnya terjadi adaptasi besar-besaran oleh semua elemen sistem Pendidikan.

B. Perkembangan Kurikulum Pendidikan Islam Di Indonesia

Perkembangan kurikulum madrasah mengalami beberapa periode yaitu:

1. Periode Sebelum Kemerdekaan

Pada periode ini sistem pendidikan dan pengajaran agama Islam Al-qur'an dan pengajian kitab yang diselenggarakan di rumah-rumah, surau, masjid, pesantren, dan lain-lain pada perkembangannya selanjutnya mengalami perubahan bentuk baik dari segi kelembagaan, materi pengajaran atau kurikulum, metode maupun struktur organisasinya sehingga melahirkan suatu bentuk yang baru yang disebut madrasah

2. Periode Setelah Kemerdekaan

Pada periode ini setelah Indonesia merdeka maka dibentuklah Departemen Agama yang akan mengurus masalah keberagamaan di Indonesia termasuk di dalamnya pendidikan, khususnya madrasah. Namun pada perkembangan selanjutnya, madrasah walaupun sudah berada di bawah naungan Departemen Agama tetapi hanya sebatas pembinaan dan pengawasan.⁶

Rentang waktu pendidikan Islam telah berjalan lama dan mempunyai jalan panjang.⁷ Namun dirasakan pendidikan Islam masih tersisih dari sistem pendidikan nasional. Keadaan ini berlangsung sampai dikeluarkannya SKB 3 Menteri.

3. Pada Masa SKB 3 Menteri

Dengan diterbitkannya SKB 3 Menteri No. 6 tahun 1975 dan No. 037/U/1975 antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri, tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. SKB 3 Menteri ini dikeluarkan pada 24 Maret 1975, yang berusaha mengembalikan ketertinggalan pendidikan Islam untuk memasuki mainstream pendidikan nasional, kebijakan ini menjadikan madrasah setara dan sederajat dengan sekolah umum lainnya.

Guna memenuhi tuntutan SKB 3 Menteri, oleh karena itu perlu diadakan pembinaan serta pembaharuan kurikulum secara menyeluruh, untuk itu telah diadakan berbagai usaha, penyusunan metode mengajar, standarisasi buku-buku madrasah dan alat-alat pelajaran. Dalam SKB tersebut disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata

pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30 % disamping mata pelajaran umum, meliputi Madrasah Ibtidaiyah setingkat dengan Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah setingkat SMP dan Madrasah Aliyah setingkat SMA.

SKB ini juga menetapkan hal-hal yang menguatkan posisi madrasah pada lingkungan pendidikan, diantaranya (a) Ijazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat., (b) Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih di atasnya., (c) Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat., (d) Pengelolaan madrasah dan pembinaan mata pelajaran agama dilakukan Menteri Agama, sedangkan pembinaan dan pengawasan mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri.

Dibawah ini akan dikemukakan langkah-langkah pokok pengembangan, strategi penyusunan dan susunan kurikulum madrasah.⁸ Langkah-langkah pokok yang ditempuh dalam pengembangan kurikulum madrasah adalah:

- a. Perumusan tujuan-tujuan institusional.
- b. Penentuan struktur program kurikulum.
- c. Penyusunan garis-garis besar program pengajaran, masing-masing dari setiap bidang studi, perumusan tujuan-tujuan instruksional dan identifikasi pokok-pokok bahan yang dijadikan program pengajaran.
- d. Penyusunan dan penggunaan satuan pelajaran, program penilaian, program bimbingan dan penyuluhan, program administrasi serta supervisi

Langkah-langkah tersebut diatas telah mendasari sifat-sifat dalam rangka pengembangan dan pembaharuan pendidikan yang selaras dan sesuai dengan sistem pendidikan nasional

Masalah-masalah pokok yang dihadapi dalam pengembangan dan pembinaan kurikulum madrasah secara nasional agar madrasah dapat menjalankan SKB 3 Menteri dan mencapai cita-cita agama islam dalam pembentukan insan yang berkepribadian muslim, yang antara lain perlu kita perhatikan adalah tentang bidang studi apa yang akan disampaikan didalam suatu madrasah.

4. Pada Masa Pasca UU No. 20/2003 dan UU No. 2 Tahun 1989

Setelah lahirnya UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berbeda dengan Undang-undang kependidikan sebelumnya, Undang-undang ini mencakup ketentuan tentang semua jalur dan jenis pendidikan. Jika pada Undang-undang pendidikan Nasional bertumpu pada sekolah, maka dalam UUSBN ini pendidikan nasional mencakup jalur sekolah dan luar sekolah, serta meliputi jenis-jenis pendidikan akademik, pendidikan professional, pendidikan kejuruan dan pendidikan agama.¹⁰

Di dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka salah satu bidang studi yang harus dipelajari oleh peserta didik di

Madrasah adalah pendidikan agama Islam, yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

SIMPULAN

Perkembangan kurikulum di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika dan evolusi pendidikan dalam menghadapi berbagai perubahan zaman dan tuntutan global. Pembaruan kurikulum yang terus menerus diperlukan untuk menjaga relevansi dan kualitas pendidikan. Dalam menghadapi tantangan masa depan, pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan, keberagaman, partisipasi stakeholder, dan pemahaman terhadap sejarah perkembangan kurikulum menjadi kunci untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas dan berdaya saing

REFERENSI

- Aslan, & Wahyudin. (n.d.). *Kurikulum dalam Tantangan Perubahan*. Bookies Indonesia.
- Eka. (2023, August). Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia: Transformasi Menuju Pendidikan yang Lebih Berkualitas. *Guru Inovatif*.
- Insani, F. D., Sunan, U., & Yogyakarta, K. (1947). SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM DI INDONESIA SEJAK AWAL KEMERDEKAAN HINGGA SAAT INI.
- Wahyuni, F. (2015a). KURIKULUM DARI MASA KE MASA (Telaah atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan di Indonesia) *Al - Adabiya*, 10(2), 231–242.
- Wahyuni, F. (2015b). KURIKULUM DARI MASA KE MASA (Telaah Pentahapan Kurikulum Pendidikan di Indonesia). *Al-Adabiya*, 10(2), 231–242.
- Zebua, R. S. Y. (2020). Potret Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari *Masa ke Masa (Sejak Tahun 1974 sampai Sekarang)*. Magister Pendidikan Indonesia UNISBA.